

Abstract

Throughout the century, the term of self-defense keeps evolving. Self-defense under international law is the right of the states to defend its sovereignty and territory towards an armed attack by other states which aimed to them. Virtually, to perpetuate the right of self-defense, necessity and proportionality under international customary law shall be met. Pursuant to the Caroline dispute, Daniel Webster, the 19th Secretary of the State of USA, had elaborated necessity into 4 principles, namely, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation. Since the establishment of the United Nations and its foundational treaty, UN Charter, the use of force shall be evaded. In this era, some of the practice of self-defense has not met its principles above. For instances, the Iraq Invasion on 2003 cannot be accepted due its allegations are doubted.

Keywords : *self-defense, article 51, un charter , the use of force*

Abstrak

Dari abad ke abad, pemahaman *self-defense* terus berkembang. *Self-defense* pada hukum internasional merupakan hak yang melekat pada negara untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya atas serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadapnya. Hakikatnya, dalam menjalankan hak membela diri, unsur keterpaksaan dan proporsionalitas menurut kebiasaan hukum internasional harus dipenuhi. Berdasarkan kasus *the Caroline dispute*, Daniel Webster, Sekretaris Negara Amerika Serikat yang ke-19, menjabarkan unsur *necessity* menjadi 4 prinsip, yakni, seketika, luar biasa, tidak ada pilihan, dan tidak ada waktu untuk bermusyawarah. Sejak lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, penggunaan kekerasan harus dihindari. Pada era saat ini, beberapa praktek *self-defense* masih ada yang belum memenuhi prinsip-prinsip diatas. Contohnya, pada Invasi Irak tahun 2003 tidak dapat diterima karena tuduhan-tuduhannya yang meragukan.

Kata kunci : *self-defense*, Pasal 51, Piagam PBB, penggunaan kekerasan